

BAB II

LITERATUR REVIEW KOMPREHENSIF

2.1. Kebaharuan Penelitian

Studi terdahulu tentang politik identitas banyak menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan fungsional. Salah satu studi yang menggunakan pendekatan struktural adalah studi dari Endang Sari dengan judul: Politik Identitas Islam dalam Pilkada DKI Jakarta (Sari E. , Politik Identitas Islam dalam Pilkada DKI Jakarta, (2016) Penggunaan pendekatan struktural dalam penelitian tersebut dapat dilihat dari hubungan antara simbol Islam dengan pemegang kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik formal yang berimplikasi pada menguatnya penggunaan simbol Islam dalam pilkada DKI Jakarta. Sedangkan pendekatan fungsional, dapat dilihat dari penelitian Kristianus dengan judul; “Politik Identitas Etnik Di Kalimantan Barat” (Kristianus, 2016) Penggunaan pendekatan fungsional dalam penelitian ini dapat dilihat dari kajiannya yang menyimpulkan bahwa politik identitas digunakan sebagai orientasi budaya Suku Dayak untuk membedakan mereka secara fungsional dengan masyarakat yang berasal dari Suku Melayu atau dari suku lainnya di Kalimantan Barat.

Penelitian ini, berbeda dengan penelitian Endang Sari dan Kristianus yang menggunakan pendekatan struktur fungsional. Penelitian ini menggunakan demokrasi deliberasi. Pendekatan yang diusulkan oleh (Nicole Curato, 2017) Penerapan praktis ide-ide deliberatif dalam konteks simbolisme politik identitas dapat membantu memitigasi konflik yang sering kali muncul dari perbedaan identitas. Misalnya, dalam situasi di mana simbol-simbol identitas digunakan untuk

memobilisasi dukungan politik atau memperkuat aliansi, pendekatan deliberatif dapat mendorong diskusi yang lebih inklusif dan reflektif. Misalnya untuk Kota Ambon dimana dalam pemilihan Walikota, jika calon walikota berasal dari kalangan nonmuslim, maka, calon wakil walikotanya berasal dari kalangan muslim, demikian pula sebaliknya. Di dalam masyarakat Kota Ambon sendiri, terkenal istilah *Pela Gandong* yaitu institusi atau lembaga budaya yang mencerminkan hubungan persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang bisa digunakan dalam menyelesaikan konflik. Fenomena simbolisme yang dimaksud dalam demokrasi deliberasi adalah sebuah pendekatan simbolisme identitas ‘gandong’ (persaudaraan) diantara marga maupun dari sisi pendekatan geografis, sehingga dalam setiap hajatan demokrasi, meskipun muncul konflik, tetapi kemudian akan disatukan dengan nilai budaya lokal yang disebut dengan identitas *pela gandong*.

Kuasa simbolisme politik identitas juga dapat melemahkan demokrasi lokal. Penggunaan politik identitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Ambon menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan politik identitas berpotensi merusak konsolidasi demokrasi dan memicu polarisasi masyarakat. Sejalan dengan pernyataan tersebut, muncul stigma dampak negatif politik identitas dalam konsolidasi demokrasi, antara lain:

- a. **Melemahkan Demokrasi:** Politik identitas dapat mengalihkan fokus dari isu-isu penting dalam Pilkada, seperti program kerja dan kompetensi calon pemimpin. Hal ini dapat menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Dalam konteks demokrasi deliberatif, (Nicole Curato, 2017) menekankan bahwa proses

deliberasi yang inklusif dan reflektif sangat penting untuk memastikan perhatian pemilih tetap pada kebijakan dan kompetensi, bukan pada identitas kelompok .

- b. Memicu Polarisasi dan Fragmentasi Masyarakat: Politik identitas dapat memperkuat sentimen primordial dan memperlebar kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini dapat memicu konflik dan kekerasan antar kelompok (Akbar M. , 2022)

Contoh konkret di Kota Ambon adalah dalam pemilihan Walikota, jika calon walikota berasal dari kalangan nonmuslim, maka calon wakil walikotanya berasal dari kalangan muslim, dan sebaliknya. Di dalam masyarakat Kota Ambon sendiri, terkenal istilah Pela Gandong, yaitu institusi atau lembaga budaya yang mencerminkan hubungan persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang bisa digunakan dalam menyelesaikan konflik. Fenomena simbolisme yang dimaksud dalam demokrasi deliberatif adalah sebuah pendekatan simbolisme identitas 'Gandong' (persaudaraan) di antara marga maupun dari sisi pendekatan geografis. Dalam setiap hajatan demokrasi, meskipun muncul konflik, nilai budaya lokal yang disebut identitas Pela Gandong membantu menyatukan kembali masyarakat .

Disamping penjelasan tersebut, tema disertasi ini tentang kuasa simbolisme politik identitas Ambon (Suatu Kajian Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Ambon) menyoroti fleksibilitas dan pertimbangan strategis dalam penggunaan simbol atau identitas tertentu dalam konteks politik atau sosial. Penelitian ini menghadirkan beberapa kebaruan dalam studi tentang demokrasi deliberatif di Kota Ambon:

1. **Konseptualisasi "Gandong" dan "Tabea":**

Penelitian ini memperkenalkan konsep "Gandong" dan "Tabea" sebagai identitas lokal yang berperan dalam mengakomodasi kelompok minoritas dan mereduksi kepentingan elit politik. Konsep ini belum banyak dikaji dalam penelitian demokrasi deliberatif di Indonesia. Penelitian ini memperkenalkan konsep deliberasi dari bawah di Indonesia, yaitu "Gandong" dan "Tabea". Kedua konsep ini mewakili identitas lokal yang memiliki peran signifikan dalam mengakomodasi kelompok minoritas dan mereduksi kepentingan elit politik

- a. Konsep "Gandong": "Gandong" merupakan filosofi budaya yang dianut masyarakat Maluku yang menekankan persaudaraan, persatuan, dan saling membantu. Filosofi ini diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Dalam konteks demokrasi deliberatif, "Gandong" dapat menjadi perekat bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, dan membantu mereka untuk bekerja sama dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera .
- b. Konsep "Tabea": "Tabea" adalah singkatan dari "Terus Benahi Ambon". Program ini diluncurkan oleh pemerintah Kota Ambon untuk membangun kembali kota yang hancur akibat konflik pada tahun 1999. "Tabea" menekankan pada semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun kota yang lebih baik. Dalam konteks demokrasi deliberatif, "Tabea" dapat menjadi platform bagi kelompok-

kelompok minoritas untuk menyuarakan aspirasinya dan terlibat dalam proses pembangunan .

- c. Keunikan Konsep "Gandong" dan "Tabea": Konsep "Gandong" dan "Tabea" merupakan konsep yang unik dan belum banyak dikaji dalam penelitian demokrasi deliberatif di Indonesia. Kedua konsep ini menawarkan solusi alternatif dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan akomodatif terhadap kelompok minoritas .
- d. Potensi Kontribusi Konsep "Gandong" dan "Tabea": Konsep "Gandong" dan "Tabea" memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi deliberatif di Indonesia dengan cara:
 - 1. Meningkatkan toleransi dan inklusivitas: Kedua konsep ini menekankan pada persaudaraan dan persatuan, sehingga dapat membantu meningkatkan toleransi dan inklusivitas antar kelompok masyarakat .
 - 2. Mengurangi polarisasi: "Gandong" dan "Tabea" dapat menjadi platform bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk berdialog serta dapat menentukan permasalahan yang solutif .
 - 3. Memperkuat partisipasi masyarakat: Memacu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan .

Konsep "Gandong" dan "Tabea" menawarkan perspektif baru dalam membangun demokrasi deliberatif di Indonesia. Kedua konsep ini memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih damai dan sejahtera .

2. Pendekatan Polikulturalisme dan Interkulturalisme:

Penelitian ini mengusulkan polikulturalisme dan interkulturalisme sebagai alternatif pendekatan dalam mengelola keragaman budaya di Kota Ambon. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih inklusif dan positif dibandingkan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah pendekatan yang mengakui dan menghargai keragaman budaya. Pendekatan ini menekankan pada koeksistensi dan toleransi antar kelompok budaya. Polikulturalisme adalah sebuah pendekatan yang mengakui dan menghargai keragaman budaya, dan juga memungkinkan adanya interaksi dan pertukaran budaya antar kelompok. Pendekatan ini menekankan pada kerjasama dan saling pengertian antar kelompok budaya.

Interkulturalisme adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada dialog dan kerjasama antar kelompok budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun saling pengertian dan penghargaan antar kelompok budaya. Pendekatan polikulturalisme dan interkulturalisme mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan multikulturalisme, yaitu:

1. Lebih inklusif: polikulturalisme dan interkulturalisme memberikan ruang bagi semua kelompok budaya untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam masyarakat.
2. Lebih positif: polikulturalisme dan interkulturalisme menekankan pada kerjasama dan saling pengertian antar kelompok budaya, sehingga dapat membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis.

Polikulturalisme dan interkulturalisme dapat diimplementasikan di Kota Ambon melalui berbagai cara:

1. Pendidikan: Pendidikan multikultural dan interkultural dapat diajarkan di sekolah-sekolah untuk memupuk toleransi dan saling pengertian antar kelompok budaya.
2. Kebijakan publik: Pemerintah Kota Ambon dapat membuat kebijakan yang mendukung polikulturalisme dan interkulturalisme, seperti kebijakan yang mempromosikan dialog antar budaya dan pertukaran budaya.
3. Kegiatan masyarakat: Masyarakat Kota Ambon dapat mengadakan berbagai kegiatan yang mempromosikan polikulturalisme dan interkulturalisme, seperti festival budaya dan seminar tentang keragaman budaya.

Polikulturalisme dan interkulturalisme adalah dua pendekatan yang menawarkan solusi yang lebih inklusif dan positif dalam mengelola keragaman budaya di Kota Ambon. Implementasi kedua pendekatan ini dapat membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan damai.

3. Peran Partai Politik:

Penelitian ini menegaskan peran penting partai politik dalam mewujudkan demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Temuan ini mendukung gagasan Agarin dan Jarret (2021) dan Khadka (2022) tentang urgensi peran partai politik dalam demokrasi deliberatif. Partai politik memiliki beberapa peran penting, di antaranya:

1. Peran partai politik dalam Sosialisasi politik masyarakat: partai politik dapat mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi deliberatif kepada masyarakat;
2. Partai politik sebagai agregator kepentingan: partai politik dapat mengagregasi kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dan menyuarakannya dalam proses politik;

Partai politik memiliki peran penting dalam mewujudkan demokrasi

deliberasi di tingkat lokal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik di Kota Ambon telah menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi deliberasi dan telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas. Diperlukan upaya untuk memperkuat peran partai politik dalam mewujudkan demokrasi deliberasi di tingkat lokal.

Perbandingan penerapan demokrasi deliberasi di Kota Ambon dengan negara lain memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami keunikan dan tantangan di Indonesia. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji secara mendalam penerapan demokrasi deliberasi da secara efektif di Kota Ambon dan di Indonesia secara keseluruhan.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Politik Identitas

Berikut ini adalah artikel-artikel hasil studi yang relevan dari hasil penelusuran peneliti. Penelitian yang paling relevan dengan masalah politik identitas agama adalah penelitian tentang menguatnya politik identitas Islam Pilgub DKI Jakarta yang di dilakukan Endang Sari. Dari penelitian tersebut terlihat menguatnya politik identitas Islam karena adanya usaha untuk membangun aspek personal serta untuk menjaga martabat yang merasa dirugikan antar sesama muslim Muslim harus menjatuhkan pilihan pada yang seiman dan seagama. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesamaan nasib dan membatasi kekuasaan mayoritas. Disamping itu muncul srategi elit politik menjaga kepentingan melalui identitas agama (Sari E. , 2016)

Prahara kebangkitan politik identitas pada Pilgub Jakarta tentu

memunculkan stigma politik yang memilah kelompok besar (kelompok Muslim) vs (kelompok non-Muslim). **Pertama:** memunculkan citra individu sebagai sesama muslim melalui solidaritas “Saya Muslim, Saya memilih Anies-Sandi”. **Kedua:** memunculkan harga diri sebagai muslim yang merasa dirugikan oleh oknum yang sengaja menjelekkan agama seperti yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama atau Ahok dengan alasan membenarkan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta dakwaan atas hukum yang diberikan oleh pihak penegak hukum (E, 2016)

Penelitian Abdul Syukur dari UIN Sunan Gunung Djati menelaah hubungan erat antara Islam, etnisitas, dan politik identitas dalam masyarakat Sunda. Kajiannya menunjukkan bahwa Sunda diwarnai oleh nilai-nilai tradisi bersama secara turun-temurun, dengan Islam sebagai agama mayoritas. Hal ini melahirkan ungkapan "Sunda adalah Islam", yang mencerminkan pengaruh kuat Islam dalam identitas Sunda. Meskipun mayoritas masyarakat Sunda beragama Islam, realitanya terdapat kelompok non-Muslim yang juga mengidentifikasi diri sebagai orang Sunda. Keberagaman keyakinan ini mewarnai lanskap politik di tanah Sunda. (Syukur, (2011))

Penelitian (Kristianus K. , 2016) dengan judul "Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat" yang bertujuan untuk menelaah bagaimana elit politik lokal memanfaatkan identitas sosial dan budaya kelompoknya untuk meraih kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitik untuk mengumpulkan data melalui wawancara, studi literatur, dan pengamatan lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa politik identitas telah menjadi orientasi budaya etnik di Kalimantan Barat. Hal ini terlihat dari pemanfaatan majelis adat

Dayak dan Melayu sebagai alat penguatan politik dan praktik politik lokal yang sarat dengan muatan identitas etnis, di mana elit politik memainkan hegemoni atas kelompok etnis lain.

Salah satu karya penting dalam memahami politik identitas dan kaitannya dengan demokrasi adalah "Democracy in Divided Societies" karya Donald L. Horowitz, (1993) Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan di berbagai negara Eropa Timur, Afrika serta dan Eropa Timur, termasuk negara-negara pecahan Uni Soviet. Ia menemukan bahwa akar kegagalan demokrasi di negara-negara tersebut sering kali terletak pada konflik etnis. Menurut Horowitz, demokrasi pada hakikatnya adalah tentang inklusi dan eksklusi, akses terhadap kekuasaan, dan hak istimewa yang diperoleh dari inklusi, serta konsekuensi hukuman dari eksklusi. Dalam konteks negara-negara dengan konflik etnis, identitas etnis menjadi faktor penentu utama dalam menentukan siapa yang akan dilibatkan dan siapa yang akan disingkirkan

(Maunati, 2004) memperkaya analisis Horowitz dengan menghadirkan perspektif alternatif tentang politik identitas etnis. Maunati meneliti kemunculan politik identitas masyarakat Dayak di Kalimantan pasca runtuhnya Orde Baru, yang diwarnai dengan peningkatan konflik etnis. Maunati berargumen bahwa konflik tersebut berakar dari marginalisasi ekonomi dan politik yang sistematis terhadap etnis Dayak oleh pemerintah Orde Baru. Penelitiannya menunjukkan bahwa kedatangan etnis Madura ke Kalimantan, yang dianggap sebagai pendatang, memperparah ketegangan dan memicu konflik karena dianggap mengganggu keseimbangan sosial dan hak-hak masyarakat Dayak sebagai penduduk asli. Maunati memperkuat analisisnya dengan merujuk pada Eriksen (1993) yang

menjelaskan bahwa identitas etnis semakin menonjol ketika kelompok etnis merasa terancam. Dalam konteks masyarakat Dayak, marginalisasi dan konflik mendorong mereka untuk memperkuat identitas etnis sebagai alat perlawanan dan penegasan kembali identitas mereka sebagai masyarakat adat Kalimantan.

Walaupun fokus dan lokasi penelitiannya berbeda, karya Horowitz dan Maunati memiliki kesamaan sudut pandang dalam memaknai politik identitas etnis di suatu wilayah. Baik Horowitz maupun Maunati menjelaskan bahwa politik identitas berawal dari konflik etnis yang dapat memecah belah masyarakat. Munculnya politik identitas merupakan reaksi terhadap dominasi satu kelompok etnis atas kelompok lain, sehingga memicu resistensi dari kelompok yang terpinggirkan. Situasi seperti ini, pada hakikatnya, dapat menjadi rintangan bagi demokrasi yang menjunjung tinggi keberagaman dan pluralisme, di mana semua kelompok berhak menyuarakan aspirasinya secara demokratis.

Fenomena serupa terjadi di Provinsi Maluku, di mana ekspansi pendatang yang mendominasi sektor ekonomi memicu perlawanan dari penduduk asli (orang Maluku) untuk merebut kembali kendali ekonomi dan politik. Tragedi kemanusiaan yang kemudian dibungkus narasi agama memicu kerusuhan di seluruh Maluku

Walaupun tulisan Horowitz dan Maunati memberikan analisis yang berharga tentang politik identitas etnis, kedua penulis tersebut tidak membahas kemungkinan kemunculan politik identitas di luar konteks konflik etnis. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini mengusulkan bahwa politik identitas dapat muncul dari kesadaran akan masalah lokal yang diyakini dapat diatasi dengan menerapkan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Nilai-nilai ini, yang

dianggap universal, diharapkan dapat diterapkan tanpa memicu konflik etnis dan membawa Maluku keluar dari kondisi "failed state".

Selain catatan tersebut, bahasan tentang politik identitas juga diulas oleh Henk Schulte (Leiden, 2008) yang menggambarkan bagaimana etnis dan agama sebagai simbolisme politik dalam upaya mengekspresikan ambisi politik dalam memobilisasi dukungan rakyat. ulasan dalam tulisan Henk Schulte Nordholt tersebut dengan mengungkap penelitian terdahulu yang dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus tertentu dari konflik lokal (lihat Aragon 2001; Davidson 2008; Duncan 2005; Bubandt 2001; Spyer 2002; Tomagola 1999). Gerry Buku (Gerry Van Klinken, 2007) adalah yang pertama menawarkan perbandingan yang meyakinkan kekerasan komunal di Indonesia. Menurut Henk Schulte Nordholt bahwa politik identitas di Indonesia seperti halnya Riau dan Bali, menggambarkan etnis dan agama sebagai basis politik untuk memobilisasi dukungan.

Pendekatan yang dijelaskan oleh Henk Schulte Nordholt dalam kajiannya (Leiden, 2008) memberikan kontribusi signifikan dalam memahami politik identitas di Indonesia. Pemahaman tentang bagaimana etnis dan agama digunakan sebagai simbolisme politik untuk mengekspresikan ambisi politik dan memobilisasi dukungan rakyat menjadi topik yang sangat relevan dalam menghadapi dinamika politik lokal.

Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Schulte Nordholt memperkaya wawasan dengan menganalisis kasus-kasus konflik lokal di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Aragon (2001), Davidson (2008), Duncan (2005), Bubandt (2001), Spyer (2002), dan

Tomagola (1999), telah membuka jalan untuk memahami bagaimana politik identitas dapat menjadi pemicu atau dampak dari konflik lokal.

Pentingnya perbandingan yang ditawarkan oleh (Klinken, 2007.) terutama dalam konteks kekerasan komunal di Indonesia, memberikan kerangka kerja yang meyakinkan. Ini menciptakan pemahaman yang lebih luas terkait dengan pola-pola politik identitas yang mungkin muncul di berbagai wilayah di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian Schulte Nordholt menyoroti bahwa politik identitas di Indonesia, seperti yang tergambar di Riau dan Bali, mencirikan etnis dan agama sebagai fondasi politik yang kuat untuk membangun dukungan rakyat. Pemahaman ini memberikan dasar penting untuk merespons tantangan dan peluang dalam mengelola dinamika politik identitas di berbagai konteks, termasuk dalam konteks pilkada Kota Ambon.

Dengan merangkum hasil penelitian sebelumnya, Schulte Nordholt memberikan kontribusi yang signifikan dalam membuka wawasan terhadap peran politik identitas, khususnya dalam memahami cara etnis dan agama diartikulasikan dan dimobilisasi sebagai simbolisme politik di Indonesia. Studi ini menjadi landasan penting untuk melihat lebih jauh bagaimana dinamika serupa mungkin berperan dalam konteks pilkada Kota Ambon

Penelitian Yeni Sri Lestari (Umar, 2018) dalam karyanya yang sangat monumental bertujuan untuk memahami realitas politik identitas di Indonesia yang kontemporer . Kajian ini difokuskan pada dua kelompok identitas utama, yaitu kelompok agama dan kelompok nasionalis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur untuk menggali data dan menganalisisnya secara mendalam. Penelitian ini dilandaskan pada kajian (Harahap, Politik Identitas

Berbasis Agama., 2014). Dalam kajiannya, Harahap memaparkan bahwa kemajemukan identitas di Indonesia terancam oleh politik identitas yang berpotensi merusak harmoni kehidupan beragama yang telah lama terjalin. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengelompokan politik berdasarkan identitas agama dan nasionalisme memicu perpecahan yang membahayakan stabilitas negara. Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, maraknya hoaks, persekusi, dan penyempitan ruang demokrasi merupakan beberapa contoh nyata dari berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi di Indonesia saat ini.

Politik identitas agama, bukan semata-mata, yang mengancam integritas nasional Indonesia. Nasionalisme juga berkontribusi pada disharmonisasi politik identitas. Identitas agama, khususnya Islam, menjadi salah satu pilar fundamental identitas nasional Indonesia. Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika politik identitas di Indonesia, membuka ruang dan akses seluas-luasnya bagi publik untuk menunjukkan keselarasan dan tujuan bersama agama (Islam) dan nasionalisme, yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia, menjadi langkah krusial. Hal ini harus dilakukan dengan mengedepankan toleransi dan persatuan, bukan dengan memperparah perpecahan melalui kebijakan dan berita-berita yang mengandung propaganda.

Kajian (Harahap, 2014) yang dianalisis oleh Yeni Sri Lestari menguak bahaya politik identitas berbasis agama bagi kemajemukan di Indonesia. Pengelompokan politik berdasarkan identitas agama dan nasionalisme berpotensi memicu perpecahan yang dapat membahayakan stabilitas negara. Dampak negatifnya meliputi :

- a. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah: Politik identitas dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah ketika agama digunakan untuk menyerang atau mendelegitimasi kebijakan dan pemimpin pemerintah.
- b. Maraknya berita bohong: Politik identitas dapat memicu penyebaran berita bohong dan informasi yang menyesatkan yang bertujuan untuk memanipulasi opini publik dan memperkuat perpecahan.
- c. Persekusi: Politik identitas dapat memicu tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama atau kelompok lain yang dianggap berbeda secara ideologi.
- d. Penyempitan ruang demokrasi: Politik identitas dapat membungkam suara-suara kritis dan membatasi ruang bagi partisipasi politik yang inklusif, sehingga melemahkan demokrasi.

Penelitian ini menekankan pentingnya menghadapi politik identitas di Indonesia dengan kebijaksanaan, bukan dengan memperparah perpecahan antara identitas agama dan nasionalisme. Kebijakan yang bijaksana dan informasi yang akurat menjadi kunci untuk menjaga harmoni dan integritas nasional di tengah dinamika politik identitas yang semakin rumit.

Hakiki dalam tulisannya di Jurnal Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, membahas tentang politik identitas agama lokal melalui studi kasus aliran kebatinan. Tulisannya mengkaji upaya untuk menghilangkan pandangan negatif terhadap agama lokal, khususnya aliran kebatinan. Hakiki menunjukkan bahwa ajaran agama lokal pada dasarnya mengandung nilai-nilai kebaikan, terbukti dengan masih tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam agama lokal, termasuk aliran kebatinan.(Hakiki, 2011). Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatannya. Data penelitian ini didukung oleh penelitian David Barret dan Todd Johnson dalam Statistik Agama-Agama yang diterbitkan setiap tahun oleh International Bulletin of Missionary Research. Laporan tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah penganut agama lokal di dunia mencapai 237.386.000 orang.

Meskipun mengalami diskriminasi, penelitian ini menunjukkan bahwa agama lokal seperti aliran kebatinan tetap menunjukkan daya tarik dan perkembangan. Klaim kebenaran absolut yang sering dikemukakan oleh agama formal seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu tidak membuat pengikut agama lokal gentar atau berpindah keyakinan. Menariknya, penganut agama resmi, secara sadar atau tidak sadar, seringkali menggabungkan keyakinan mereka dengan kepercayaan agama lokal

Menurut Hakiki, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah perselingkuhan antara agama-agama besar menggunakan kekuasaan. Undang-undang yang dibuat tidak hanya didasarkan pada kepentingan hukum semata, tetapi juga penuh dengan muatan politik. Hal ini menyebabkan undang-undang tersebut bias dan memihak kepentingan mayoritas, sehingga kelompok minoritas, dalam hal ini agama atau kepercayaan lokal, mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Barret, 2003), sebagaimana dijelaskan dalam statistik agama-agama yang diterbitkan oleh International Bulletin of Missionary Research pada tahun 2003, mencatat bahwa penganut agama lokal di dunia mencapai 237.386.000 orang. Oleh karena itu, penelitian Hakiki menekankan bahwa agama lokal, termasuk aliran kebatinan, meskipun menghadapi diskriminasi, tetap berkembang dan diminati.

Hakiki menyoroti bahwa undang-undang yang dirancang tampaknya tidak hanya mencerminkan kepentingan hukum semata, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik. Sebagai akibatnya, undang-undang tersebut cenderung mendukung kepentingan mayoritas sementara mengabaikan kelompok minoritas, termasuk agama atau kepercayaan lokal. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum dan politik terhadap agama lokal, yang menjadi salah satu fokus perhatian Hakiki dalam penelitiannya.

Kajian selanjutnya tentang politik identitas, seperti yang dibahas dalam karya Ari Ganjar Herdiansah, meneliti strategi organisasi dan kelompok Islam dalam membangun narasi dan mempertahankan pengaruhnya di media sosial sebagai platform alternatif untuk mengartikulasikan pandangan politik. (Ari Ganjar Herdiansah, 2018). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang terdiri dari analisis sentimen dan analisis diskursif. Beberapa kajian terdahulu yang diulas dalam analisisnya adalah Laclau dengan menggunakan psikoanalisis Lacan dengan mengamati point de capiton (titik nodal, dalam istilah Laclau) atau pusat wacana, di mana dia membedakan momen (artikulasi diskursif) dan elemen (artikulasi non-diskursif) (Laclau, 1985). Penelitian ini mengungkap bahwa media sosial telah menjadi medan pertempuran bagi organisasi dan kelompok Islam dalam menyampaikan sikap politik mereka kepada pemerintah. Organisasi yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan cenderung menyuarakan pandangan yang selaras dengan kepentingan pemerintah

Di sisi lain, kelompok oposisi yang terhalang mengakses media sosial sebagai alat delegitimasi otoritas, mengalami kesulitan dalam menyuarakan kritik mereka. Meskipun media sosial telah menjadi alat populer bagi masyarakat sipil Islam untuk

mengartikulasikan pandangan politik mereka dalam proses demokratisasi, penggunaannya tetap terikat pada batasan-batasan nilai demokrasi yang diterapkan. Penting untuk diingat bahwa media sosial juga dapat menjadi sarana penguatan wacana politisasi agama, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratisasi itu sendiri.

Penelitian ini merinci pendekatan Laclau, yang menggunakan psikoanalisis Lacan dan mengamati titik nodal atau pusat wacana dalam memahami bagaimana organisasi dan kelompok Islam membangun artikulasi politiknya. Laclau membedakan momen (artikulasi diskursif) dan elemen (artikulasi non-diskursif) dalam konstruksi wacana. Penelitian ini mengungkap bahwa media sosial telah menjadi medan pertempuran bagi organisasi dan kelompok Islam dalam menyampaikan sikap politik mereka kepada pemerintah. Organisasi yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan cenderung menyuarakan pandangan yang selaras dengan kepentingan pemerintah. Di sisi lain, kelompok oposisi yang terhalang mengakses media sosial sebagai alat delegitimasi otoritas, mengalami kesulitan dalam menyuarakan kritik mereka.

Peran penting media sosial sebagai alat artikulasi politik termanifestasi dalam konteks demokratisasi di kalangan masyarakat sipil Islam. Namun, penelitian ini juga menyoroti batasan-batasan nilai demokrasi yang dapat diterapkan dalam penggunaan media sosial. Media sosial, meskipun dapat memperkuat wacana politisasi agama, juga memiliki potensi untuk bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Kesimpulan ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dalam peran media sosial dalam konteks politik dan identitas Islam di masyarakat.

(Nasrudin, 2018) dalam karyanya, meneliti politik identitas dengan fokus pada orientasi dan keterwakilan politik identitas dalam Pilgub DKI Jakarta 2018-2022. Untuk menganalisis fenomena ini, Juhana Nasrudin menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Juhana Nasrudin dalam penelitiannya menggunakan beberapa karya terdahulu untuk memperkaya analisisnya. Salah satunya adalah karya (Suryani., 2016) yang menjelaskan bahwa era reformasi, dengan dibukanya kran partisipasi politik, secara otomatis dapat memicu menguatnya identitas politik dan keterwakilan politik. Lebih lanjut, Juhana Nasrudin memaparkan bahwa Pilgub Jakarta pada putaran kedua memiliki pengaruh orientasi serta keterwakilan politik identitas.

Dalam penelitian ini, orientasi analisis difokuskan pada tiga aspek utama: ekonomi, agama, dan ras. Penjelasan politik dalam konteks Pilkada DKI putaran kedua menunjukkan beberapa poin penting yang mempengaruhi elektabilitas pasangan calon. Pertama: Fluktuasi Elektabilitas. Elektabilitas pasangan calon mengalami fluktuasi yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai kasus yang mencuat selama masa kampanye. Beberapa lembaga survei mengindikasikan bahwa perubahan elektabilitas ini erat kaitannya dengan isu-isu terkait etnis dan agama. Kasus-kasus tersebut, yang telah dibahas sebelumnya, menciptakan dinamika politik yang kompleks dan mempengaruhi persepsi serta dukungan pemilih terhadap masing-masing kandidat. Kedua: Kemenangan Anies-Sandi. Pasangan Anies-Sandi berhasil memenangkan putaran kedua Pilkada DKI. Kemenangan ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor penting, termasuk:

- a. Aksi Damai 212: Demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai aksi damai 212 memainkan peran krusial. Aksi ini terkait dengan kasus hukum

yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dituduh melakukan penistaan agama. Mobilisasi massa dalam aksi ini menunjukkan kekuatan sentimen agama dalam mempengaruhi hasil pemilihan.

- b. Sentimen Agama dan Etnis: Sentimen agama dan etnis juga menjadi faktor penentu dalam kemenangan Anies-Sandi. Isu-isu ini mempengaruhi persepsi pemilih, di mana sebagian besar pemilih Muslim cenderung memberikan dukungan kepada Anies-Sandi sebagai reaksi terhadap kasus yang menimpa Ahok.
- c. Strategi Kampanye: Strategi kampanye yang efektif juga berkontribusi pada kemenangan ini. Tim Anies-Sandi berhasil memanfaatkan isu-isu yang sensitif bagi pemilih dan mengarahkan kampanye mereka sesuai dengan dinamika sosial-politik yang berkembang. . (Nasrudin, 2018).

Dalam konteks Pilkada DKI putaran kedua, jelas bahwa orientasi ekonomi, agama, dan ras memainkan peran penting dalam menentukan hasil akhir. Fluktuasi elektabilitas akibat kasus-kasus tertentu dan keberhasilan pasangan Anies-Sandi menunjukkan bagaimana dinamika politik lokal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami konteks sosial dan politik dalam menganalisis hasil pemilihan dan strategi kampanye

Pentingnya faktor-faktor tersebut terlihat dalam kemenangan pasangan calon Anies-Sandi pada pemilihan putaran kedua. Nasrudin menyoroti beberapa faktor latar belakang, termasuk aksi damai 212 terkait kasus hukum yang menjerat Ahok. Dengan merinci dampak dari faktor-faktor tersebut, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana politik identitas memainkan peran krusial dalam dinamika Pilkada DKI Jakarta. Melalui analisis orientasi politik

identitas yang melibatkan aspek ekonomi, agama, dan ras, karya ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang kompleksitas politik lokal dan peran identitas dalam proses demokrasi di tingkat pemerintahan daerah.

Analisis yang sama adalah karya Daud Rasyid dkk (Daud Rasyid, 2020) yang melihat Gerakan Politik Identitas pada Pilkada di DKI Jakarta. metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif (studi kasus). Beberapa studi terdahulu yang memotret politik identitas yang diajukan oleh penelitian ini adalah hasil survei PPIM (Pusat Islam dan Komunitas Studi) seperti yang dikutip oleh Jamhari (2003) Umat Islam Indonesia menyatakan bahwa agama (70%) selalu dipertimbangkan setiap kali membuat keputusan tentang masalah sosial dan politik. Jadi, Secara antropologis dan sosiologis, suasana kehidupan sosial yang kacau balau hingga tajam krisis moral agama (masih) menjadi fondasi masa depan umat manusia. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa:

Pertama; Dengan keberadaan umat Islam sebagai mayoritas, distribusi aspirasi politik mengikuti nilai-nilai dan perjuangan Islam, dan keberadaan partai politik Islam dianggap sebagai aspirasi organisasi perjuangan Islam. Secara sosiologis dan konteks teologis, masyarakat membutuhkan partai Islam untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga motif ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh elit politik, termasuk dalam aspek memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

Kedua; Gerakan populisme Islam yang murni telah bertransformasi menjadi model baru, di mana kelompok-kelompok populis bersatu dalam aliansi antar kelas untuk meraih kekuasaan. Transformasi ini menunjukkan bahwa gerakan populisme Islam telah melampaui identitasnya sebagai gerakan murni dan kini terikat pada kepentingan politik praktis. Aksi 212, yang sebelumnya dianggap sebagai aksi

romantisme, kini telah menjadi alat politik identitas dalam Pilpres 2019.

Ketiga; Demokrasi terbuka di Indonesia membuka jalan bagi keterlibatan langsung kelompok Salafi dalam politik. Kelompok ini menunjukkan kecenderungan untuk mengadopsi wacana yang lebih pragmatis dan praktis. Kemampuan beradaptasi Gerakan Salafi terhadap perubahan kondisi politik di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, patut dicatat. Fleksibilitas ini menantang pandangan umum yang melihat Salafisme sebagai agama yang berpusat pada teologi kaku.

Menurut Ahmad Mukri Aji (2019), politik identitas di Indonesia muncul sebagai respons umat Islam terhadap aksi penistaan agama yang dilakukan oleh mantan gubernur Jakarta, Ahok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (studi kasus) untuk menganalisis fenomena politik identitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa gerakan Islam struktural dan kultural memainkan peran penting dalam menegakkan misi umat Islam (Ahmad Mukri Aji, 2019)

Gerakan-gerakan ini dapat mentransformasikan Indonesia menjadi ummat Islam yang berjiwa luhur Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terlepas dari perbedaan pendekatan mereka, ternyata Islam struktural dan kultural tetap hidup dan berkembang dengan kontribusinya. Perlu dicatat bahwa perjalanan berikutnya adalah budaya Islam. Dengan hasil positif dari gerakan ini, maka perlu mempertimbangkan jalur struktural dalam kerangka perjuangan politik. Keberadaan ICMI merupakan salah satu bukti Islam kultural di Indonesia, yang kemudian mulai mempertimbangkan jalur struktural.

Analisis ini menunjukkan bahwa gerakan Islam, baik yang bersifat struktural maupun kultural, memiliki peran penting dalam membentuk politik identitas umat

Muslim di Indonesia. Terutama, adanya pertimbangan untuk memasukkan jalur struktural menunjukkan evolusi dan adaptabilitas gerakan Islam dalam konteks perjuangan politik di Indonesia.

Hal lain yang dikemukakan oleh (Hanan, 2020) yang mencoba menganalisa Politik Identitas Dalam Pemilihan Umum Indonesia 2019, makna dan batasannya. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjelaskan penggunaan politik identitas yang terus meningkat. Menganalisis Faktor-Faktor Kemenangan Petahana dalam Pemilu Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (studi kasus). Beberapa studi terdahulu yang digunakan untuk memotret politik identitas dalam pemilihan umum di Indonesia antara lain: Penelitian ini menemukan bahwa politik identitas mengalami peningkatan dan memainkan peran penting dalam pemilu, termasuk melalui penggunaan berita hoaks. Namun, pengaruh politik identitas dibatasi oleh faktor-faktor fundamental (seperti penilaian publik terhadap petahana), sehingga tidak menjadi faktor penentu dalam pemilihan presiden. Studi ini memberikan gambaran komprehensif tentang peran politik identitas dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Faktor-faktor yang membatasi dampak identitas politik juga diidentifikasi, termasuk persaingan multipolar dan faktor-faktor fundamental dalam penilaian publik.

Trinugraha, dalam karyanya yang berjudul "Politik Identitas Anak Muda Minoritas: Ekspresi Identitas Anak Muda Tionghoa melalui Dua Organisasi Anak Muda Tionghoa di Surakarta Pasca Orde Baru", mengkaji dinamika identitas anak muda Tionghoa yang terwujud melalui dua organisasi anak muda Tionghoa di Kota Surakarta. ((Trinugraha, 2013). Solo Youth Club (SYC) dan Hoo Hap Youth club (HYC) adalah dua organisasi yang muncul pasca Orde Baru. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini mengungkap bahwa politik identitas yang dijalankan oleh SYC dan HYC termanifestasi dalam berbagai kegiatan sosial mereka. Meskipun bertujuan untuk mencairkan dan mempersempit jarak sosial dengan kelompok masyarakat non-Tionghoa, kegiatan-kegiatan ini diiringi oleh paradoks, salah satunya adalah pola karitatif yang berpotensi menjebak dan memperkuat stereotip yang selama ini melekat pada etnis Tionghoa.

Penelitian ini menemukan bahwa di balik upaya penyatuan etnis Tionghoa, terdapat relasi kuasa yang kompleks antara generasi tua dan muda dalam dua organisasi Tionghoa tersebut. Studi ini mengungkap bagaimana anak muda Tionghoa di Surakarta memanfaatkan organisasi mereka untuk mengekspresikan identitas, menjalin hubungan dengan kelompok lain, namun di saat yang sama, mereka juga dihadapkan pada paradoks dan potensi relasi kuasa internal dalam komunitas Tionghoa.

Selain beberapa pandangan tentang politik identitas yang diulas diatas, karya lainnya adalah tulisan Tanja A. Börzel And Thomas Risse yang membahas sejauh mana wawasan dari Eropa telah menyebar ke wilayah lain di dunia. Elit yang terlibat dalam pembangunan daerah hampir selalu mengembangkan narasi identitas yang menghubungkan pengalaman nasional mereka dengan daerah masing-masing yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penelitian ini difokuskan pada jalur kausal yang mengarah dari identitas ke integrasi regional dalam hal distribusi kekuatan inti negara ke lembaga-lembaga regional serta penyatuan dan pendelegasian wewenang di tingkat daerah, bahwa Eropa dan UE tidak unik sejauh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan-

identitas. Wacana identitas elit yang membangun wilayah tampaknya ada di mana-mana bahkan di Utara Afrika dan Timur Tengah, di mana mereka belum menghasilkan regionalisme yang kental. Warga di seluruh dunia tampaknya memiliki banyak identitas, mampu mengidentifikasi dengan negara-bangsa dan wilayahnya masing-masing secara bersamaan. Pada saat yang sama, bahwa kisah fungsional integrasi regional dimulai dengan saling ketergantungan (ekonomi atau keamanan), kemudian transfer kekuatan inti negara ke lembaga-lembaga regional dan, pada akhirnya, munculnya identitas kedaerahan. (baik melalui neofungsionalisme ras atau transaksionalisme) mungkin harus terbalik (lihat juga Hooghe et al., 2019). Bukti dari Eropa, Asia Tenggara, Afrika sub Sahara dan Amerika Latin menunjukkan bahwa upaya pembangunan institusi regional oleh para elit biasanya disertai dengan narasi identitas yang menghubungkan komunitas nasional dengan komunitas regional. (Risse, 2020). Studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana identitas, terutama identitas kedaerahan, dapat menjadi faktor penting dalam proses pembangunan dan integrasi regional di berbagai belahan dunia.

Ditingkat lokal, politik identitas semakin marak terjadi bahkan menjadi trend politik Indonesia menjelang pemilu 2024. ragam etnis, budaya, agama serta kepercayaan yang berbeda, membuat keragaman tersebut sulit menghindari adanya gesekan-gesekan politik baik secara nasional maupun lokal. Ideologi merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang berakar dari nilai-nilai budaya dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat sebagai panduan untuk mencapai perubahan yang diharapkan. Menurut Feith, seperti yang dikutip oleh Habibi, kemunculan politik identitas di Indonesia berawal dari lima aliran utama, yaitu:

1. Komunisme, meskipun berakar pada konsep-konsep Barat, berhasil beradaptasi dengan konteks lokal Indonesia dengan menggunakan istilah-istilah politik yang familiar bagi masyarakat abangan tradisional. Hal ini menjadi salah satu faktor kunci di balik dukungan kuat yang diterima komunisme di Indonesia. Manifestasi utama komunisme sebagai kekuatan politik di Indonesia adalah melalui Partai Komunis Indonesia (PKI)
2. Sosialisme Demokrat, yang terinspirasi oleh pemikiran Barat, berkembang dalam Partai Sosialis Indonesia.
3. Islam, terbagi menjadi dua varian: kelompok Islam Reformis atau Modernis, yang berpusat pada Partai Masyumi, serta kelompok Islam konservatif atau tradisional, yang berpusat pada Nahdlatul Ulama.
4. Nasionalisme Radikal memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan gerakan kemerdekaan Indonesia.
5. Aliran ini memiliki pengaruh besar terhadap cara pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya (PIR) dan kelompok Teosufis (kebatinan) (Habibi, 2018).

Analisis ini memberikan perspektif luas mengenai kompleksitas politik identitas di Indonesia, dengan berbagai aliran yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan sejarah politik negara ini. Kelima aliran itu muncul dalam diagram pemikiran politik antara tahun 1945-1965 yang dibuat oleh Herbert Feith

Kerangka inilah yang kemudian mewarnai politik identitas Indonesia sekaligus sebagai model politik aliran Indonesia. Tulisan yang diulas Habibi tersebut dapat membuat kesimpulan bahwa berdasarkan jumlah etnis yang ada di Indonesia dengan mencontohkan Papua saja yang memiliki 252 suku dengan Bahasa

khasnya masing-masing, maka sulit bagi Indonesia untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jika merunut dari penjelasan di atas, etnis-etnis di Indonesia yang diduga menguasai sebagian wilayah lambat laun akan menjadi bom waktu bagi orang lokal yang secara perlahan dikuasai oleh etnis tertentu. disinilah kemudian titik pergeseran nilai budaya lokal yang menimbulkan banyak kecemburuan sosial bahkan tidak jarang terjadi di Indonesia. Contoh lain dari kecemburuan sosial, ekonomi maupun politik adalah Maluku terutama Kota Ambon dimana dugaan pergeseran nilai tersebut puncaknya terjadi pada prahara kemanusiaan pada tahun 1999 yang terjadi sebagai akumulasi dari pola-pola penguasaan sentra ekonomi oleh masyarakat pendatang, sehingga isu yang muncul adalah pengusiran warga pendatang atau Buton Bugis Makassar (BBM)

Penjelasan berikutnya adalah tulisan Abdul Noury and Gerard Roland yang mencoba menjelaskan bagaimana transformasi perubahan dan sikap pemilih terhadap partai politik. Kebangkitan politik identitas di negara-negara Eropa, diperoleh gambaran tentang perubahan transformasi dan pembelahan baru bagi partai dan dianggap populis dari berbagai pihak. Dua penyebab munculnya populisme antara lain adalah persoalan ekonomi dan budaya. Hubungan antara ekonomi dan budaya adalah salah satu upaya dari tulisan Noury tersebut meneukan adanya kompleksitas antara factor ekonomi dan budaya. (Roland, 2020). Penjelasan ini memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan ekonomi dan pergeseran budaya dapat mempengaruhi sikap pemilih dan mengarah pada munculnya populisme serta politik identitas di berbagai negara Eropa.

Penjelasan yang berbeda dikemukakan oleh Kamaruddin Salim yang mencoba mengungkap ruang identitas etnis, aktor serta posisi elit penguasa lokal di

Maluku Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (studi kasus). Hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk menganalisa permasalahan etnis, aktor serta posisi elit penguasa lokal di Maluku Utara antara lain: ***Pertama***, Politik identitas etnis di Maluku Utara menjadi alat bagi para aktor politik untuk memanipulasi masyarakat demi memperkuat kekuasaan elit dan penguasa lokal. ***Kedua***, Interaksi antara aktor dan struktur politik lokal di daerah menghadirkan kompleksitas tersendiri bagi partai politik dalam menjalankan agenda politiknya. ***Ketiga***, Politik identitas etnis di Maluku Utara, didorong oleh pragmatisme etnis, mendorong etnis menjadi kekuatan politik yang luwes dan melahirkan budaya politik yang akomodatif, menciptakan iklim demokrasi yang kondusif di provinsi ini.

Studi ini menunjukkan bahwa politik identitas etnis dalam Pilgub Maluku Utara 2013 merupakan realitas politik yang sengaja direkayasa oleh aktor informal, struktur partai politik, dan birokrasi pemerintahan untuk membangkitkan semangat etnis demi meraih dukungan suara dari masyarakat dan kelompok etnis tertentu. Reproduksi politik identitas etnis dalam Pilkada Maluku Utara menjelma menjadi kekuatan politik yang hegemonik. Bersamaan dengan itu, aktor informal di luar struktur partai politik dan birokrasi berperan sebagai mesin politik alternatif yang memperkuat eksistensi dan keberaniannya dalam mendukung kandidat yang bertarung dalam pilkada langsung. (Salim, 2015).

Dengan asumsi tersebut, maka penulis kemudian mencoba untuk membedah persoalan tersebut dengan mengajukan beberapa catatan teori sekaligus untuk menjawab permasalahan. Teori pertama adalah seperti yang disadur dari (Widayanti, 2009: 14-15), yang mencoba memetakan politik identitas melalui 3

pendekatan utama. *Pendekatan pertama* berkaitan dengan pembentukan identitas primordialisme yaitu pemahaman ideologi diperoleh secara alamiah atau turun temurun. *Pendekatan kedua* melalui konstruktivisme yang menyatakan identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. Marga atau *fam* bias menjadi pola ikatan yang memicu pembentukan identitas. *Pendekatan yang ketiga* adalah Instrumentalisme adalah pandangan bahwa identitas dibangun untuk kepentingan elit dan menekankan dominasi kekuasaan.

.Dalam rangkaian dinamika serta penjelasan tentang politik identitas yang dijelaskan diatas, sebetulnya bisa menggambarkan tentang dinamika politik identitas di Propvinsi Maluku terutama di Kota Ambon. Pendekatan pertama misalnya yang berkaitan dengan identitas primordialisme, sangat mungkin memahami ini karena persoalan primordialisme sangat kuat dimana simbol-simbol politik lokal misalnya di Kota Ambon seringkali menggunakan sentiment etnis untuk menjelaskan atau menegaskan individu lokal, baik itu yang terjadi pada lingkaran birokrasi pemerintahan, politik hingga masuk pada fenomena kehidupan sosial.

Di samping itu, dalam menentukan politik identitas, penulis kemudian mencoba melihat kembali model Castells yang menurutnya bisa dilihat; *pertama*: Legitimasi identitas, merujuk pada identitas yang dibangun oleh institusi yang dominan dalam kehidupan sosial. Institusi ini menegaskan dominasinya dengan menetapkan identitas tertentu pada individu atau kelompok. *Kedua*, Resistensi identitas, adalah identitas yang diberikan oleh aktor sosial tertentu dalam situasi tekanan akibat dominasi, yang memicu respons perlawanan dan pembentukan

identitas baru yang berbeda dari mayoritas anggota komunitas sosial lainnya. Konstruksi identitas semacam ini dijelaskan oleh Coulhoun sebagai politik identitas *Ketiga* Proyek identitas, adalah proses pembentukan identitas oleh aktor sosial dari kelompok tertentu, dengan tujuan menciptakan identitas baru untuk mencapai posisi tertentu dalam masyarakat. Fenomena ini dapat terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang dapat mengubah struktur sosial secara menyeluruh.

Berdasarkan beberapa pemahaman sebelumnya, politik identitas berkaitan erat dengan penggunaan stereotip yang dipengaruhi oleh perspektif primordialisme. Dalam konsep politik Aristoteles, primordialisme mengacu pada "berperang ke luar dan konsolidasi ke dalam". Oleh karena itu, politik identitas sering kali dipenuhi dengan konflik, baik yang bersifat langsung maupun yang dialectical. Politik identitas senantiasa berada dalam konteks ketegangan antara superioritas dan inferioritas, mayoritas dan minoritas, seperti yang terjadi di Maluku saat ini.

Menurut Antony Giddens, identitas diri dapat dinarasikan tentang individu seseorang, yang memang menceritakan tentang perasaan serta konsistensi bagi individu. dengan demikian maka politik identitas akan memasukkan dirinya dalam wilayah politik, dimana wilayah politik tersebut berkaitan dengan apa yang sesungguhnya menempatkan dirinya dalam arena politik. Menurut (Giddens 1991), identitas tersebut berupaya untuk menjawab pertanyaan kritis seperti apa yang dikerjakan?, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi aktornya. Artinya bahwa setiap individu akan berupaya untuk mengkonstruksi permasalahan identitas yang saling berhubungan, dimana individu akan membentuk lintasan perkembangan dari pengalaman masa lalu menuju masa depan.

Dalam pandangan (Schultz, Emily and Lavenda, 2001) bahwa Identitas dan etnisitas terbentuk melalui proses sejarah yang mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial yang beragam ke dalam sebuah struktur politik tunggal di bawah situasi sosial tertentu. Selain itu, Giddens menegaskan bahwa etnisitas selalu berakar pada identitas individu dan kelompok. Giddens juga menyoroti pentingnya identitas ini bagi sebuah kelompok etnik, hal ini karena *“It can provide an important thread of continuity with past and is often kept alive through the practice of cultural traditions”* (Giddens, 1991) Sebuah identitas tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui serangkaian proses. Pandangan Anthony Giddens, seorang sosiolog terkemuka, menekankan bahwa etnisitas berakar pada identitas individu dan kelompok. Identitas etnis selalu terkait dengan sejarah dan sering kali dipertahankan melalui praktik tradisi budaya. Giddens berpendapat bahwa identitas etnis memberikan kontinuitas yang penting dengan masa lalu.

Pentingnya identitas etnis bagi kelompok tertentu dapat dijelaskan oleh fakta bahwa identitas ini tidak hanya mencerminkan keberlanjutan dengan masa lalu, tetapi juga dijaga melalui praktik budaya tradisional. Dengan kata lain, identitas etnis tidak hanya menjadi warisan dari masa lalu, tetapi juga dihidupkan kembali dan dipertahankan melalui praktik kebudayaan yang terus berlangsung.

Giddens menyoroti bahwa proses pembentukan identitas tidak terjadi secara instan; sebaliknya, itu melibatkan berbagai proses. Proses ini dapat mencakup pengenalan diri dengan sejarah, adat istiadat, dan praktik budaya kelompok etnis tertentu. Identitas etnis menjadi kerangka yang memberikan kontinuitas dengan masa lalu, sambil terus berkembang melalui interaksi dan praktik kehidupan sehari-hari.

Dengan penekanan pada peran identitas individu dan kelompok dalam konteks etnisitas, Giddens menyoroti kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam pembentukan serta pemeliharaan identitas etnis. Identitas etnis bukanlah entitas statis, tetapi melibatkan proses yang terus menerus dan beradaptasi dengan perubahan konteks sosial dan budaya.

Stets dan Burke (2000) menjelaskan bahwa identitas terbentuk melalui proses kategorisasi dan identifikasi diri. Proses ini melibatkan refleksi diri di mana individu menjadi objek yang dapat dikategorikan, diklasifikasikan, atau dinamai berdasarkan kategori atau klasifikasi sosial lainnya.

Dalam pemikiran (Burke, 2000) proses kategorisasi adalah cara individu memandang dan memahami dirinya sendiri dengan merinci karakteristik atau atribut yang mengidentifikasinya. Identifikasi diri kemudian terjadi ketika individu mengaitkan dirinya dengan kategori atau klasifikasi sosial tertentu, memberikan arti pada bagaimana individu melihat dirinya sendiri dalam konteks sosial.

Dengan demikian, proses ini dapat berupa individu yang merefleksikan dirinya sebagai bagian dari kelompok etnis, agama, atau kelas sosial tertentu. Identifikasi diri ini tidak hanya mencakup pengenalan karakteristik diri sendiri tetapi juga pengakuan dan penerimaan peran atau status dalam suatu kelompok atau kategori tertentu.

Pendekatan ini mencerminkan bagaimana individu menyusun pemahaman tentang siapa mereka dan bagaimana mereka berhubungan dengan lingkungan sosial mereka. Konsep identitas sebagai hasil dari proses kategorisasi dan identifikasi diri memberikan pemahaman yang dalam tentang dinamika kompleks di balik pembentukan identitas individu dalam konteks sosial.

Stets dan Burke menambahkan bahwa konsekuensi dari proses kategorisasi diri ini adalah penekanan pada kesamaan persepsi antara diri sendiri dan anggota lain di dalam kelompok, serta penekanan pada perbedaan persepsi antara diri dan individu lain di luar kelompok. Penekanan atas kesamaan dan perbedaan ini didasarkan pada sikap, keyakinan, nilai-nilai, reaksi afektif, norma perilaku, gaya berbicara, dan atribut lainnya yang diyakini berkaitan dengan kategorisasi kelompok yang relevan. Stets dan Burke menjelaskan bahwa identitas sosial yang menonjol memperkuat pengaruh keanggotaan individu dalam kelompok tersebut terhadap persepsi dan perilakunya secara psikologis. Untuk membuat identitas menonjol, diperlukan komitmen dari anggota kelompok. Komitmen ini memiliki dua aspek. **Pertama** adalah aspek kuantitatif, yaitu jumlah orang yang terikat melalui identitas tersebut. Semakin banyak orang terikat dengan identitas tersebut, semakin besar kemungkinan identitas tersebut diaktifkan dalam suatu situasi. Dengan kata lain, semakin kuat komitmen, semakin menonjol identitas tersebut. Aspek **kedua** dari komitmen adalah kualitatif, yaitu kekuatan atau kedalaman hubungan relatif dengan orang lain. Hubungan yang lebih kuat dengan orang lain melalui identitas yang lebih menonjol (Stets, 2000).

Salah satu tulisan Henk Schulte Nordholt KITLV Leiden/VU University Amsterdam, *Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: an Essay*, 2008 kemudian mencoba menggambarkan bagaimana politik identitas dilihat dari etnis dan agama untuk mengekspresikan ambisi politik dan memobilisasi dukungan rakyat. Ini menunjukkan bahwa etnis merupakan bagian dari proses sosial yang cenderung dapat menimbulkan situasi perbedaan di antara kelompok dalam masyarakat. Berbeda dengan pemahaman Yeni Sri Lestari dalam memahami politik

identitas dilihat antara nasionalisme dan agama, dimana dalam kesimpulanya menempatkan nasionalisme dan agama bisa menimbulkan bias politik identitas dan mengarah kepada penghancuran integritas kehidupan beragama yang telah lama dipertahankan.

Analisis Henk Schulte Nordholt dalam tulisannya, "Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: an Essay" (2008), memberikan perspektif tentang bagaimana politik identitas dilihat dari sudut pandang etnis dan agama. Pemahaman ini menyoroti bahwa identitas etnis dan agama dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan ambisi politik dan memobilisasi dukungan rakyat.

Dalam konteks etnis, identitas etnis menciptakan dinamika sosial yang dapat menimbulkan perbedaan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perbedaan etnis menjadi bagian dari proses sosial yang kompleks dan dapat mempengaruhi dinamika politik di tingkat lokal maupun nasional. Etnisitas seringkali menjadi dasar dukungan politik bagi kelompok tertentu.

Di sisi lain, Yeni Sri Lestari, dalam pemahamannya tentang politik identitas antara nasionalisme dan agama, menyimpulkan bahwa hubungan antara nasionalisme dan agama dapat menimbulkan bias politik identitas. Dalam konteks ini, ia mencemaskan bahwa politik identitas yang didasarkan pada nasionalisme dan agama dapat mengarah kepada penghancuran integritas kehidupan beragama yang selama ini dipertahankan.

Dua perspektif ini menunjukkan kompleksitas dalam analisis politik identitas, dan bagaimana identitas etnis dan agama dapat memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Berbeda pandangan tersebut mencerminkan keragaman

opini di dalam kajian politik identitas dan menyoroti pentingnya memahami konteks historis dan budaya dalam menganalisis peran identitas dalam arena politik.

Selain tulisan tersebut, (Hanan, 2020) dalam judul jurnalnya: *Identity Politics In The 2019 Indonesian General Elections: Its Significance And Limitation*, dimana dalam memahami penggunaan politik identitas yang terus meningkat, signifikansi politik identitas dalam pemilu presiden serta pileg. Dalam hasil analisisnya mengungkapkan bahwa landasan politik identitas dianggap sangat subur, tantangan bagi orang Indonesia adalah bagaimana menghindari atau mencegah dua kondisi yang menempatkan politik identitas dalam permainan: persaingan head to head dan meluasnya perasaan bahwa suatu identitas terancam.

Analisis ini menyoroti signifikansi politik identitas dalam pemilihan umum, di mana partai dan kandidat cenderung menggunakan identitas tertentu untuk memobilisasi dukungan. Namun, sejalan dengan signifikansi tersebut, terdapat juga batasan-batasan yang perlu diatasi, khususnya terkait dengan potensi persaingan yang intens dan perasaan ancaman terhadap identitas tertentu.

Tulisan ini memberikan wawasan tentang kompleksitas politik identitas dalam konteks demokrasi Indonesia, di mana tantangan dan perluasan perasaan ancaman terhadap identitas menjadi titik perhatian penting untuk diatasi agar proses politik yang lebih inklusif dan harmonis dapat terwujud.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Tanja A. Börzel And Thomas Risse (2020), *Identity Politics, Core State Powers and Regional Integration: Europe and beyond*, mencoba menganalisis sejauh mana wawasan dari Eropa telah menyebar ke wilayah lain di dunia. Elit yang terlibat dalam pembangunan daerah hampir selalu mengembangkan narasi identitas yang menghubungkan pengalaman

nasional mereka dengan daerah masing-masing. dalam analisisnya mengungkapkan bahwa identitas nasionalis yang inklusif dan eksklusif juga terjadi di luar Eropa.

Analisis ini menunjukkan bahwa dinamika politik identitas tidak hanya terjadi di Eropa tetapi juga dapat diamati di wilayah di luar Eropa. Identitas nasional dan regional dapat memainkan peran kunci dalam perjalanan integrasi dan pembangunan wilayah, mempengaruhi bagaimana kebijakan dan kekuatan inti negara terlibat dalam proses ini.

Politik identitas telah menarik perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks studi pasca-kolonial, politik identitas telah menjadi fokus utama. Pemikir seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha, dan Gayatri C. Spivak sering diakui atas kontribusi mereka dalam menjadikan politik identitas sebagai topik sentral dalam diskusi sejarah dan budaya. Dalam literatur ilmu politik, terdapat perbedaan yang signifikan antara identitas politik (*political identity*) dan politik identitas (*politics of identity*). Identitas politik merujuk pada konstruksi yang menentukan posisi dan kepentingan subjek dalam suatu komunitas politik, sedangkan politik identitas mengacu pada mekanisme politik yang mengorganisasikan identitas (baik politik maupun sosial) sebagai sumber dan alat politik. Dengan demikian, *political identity* lebih menyoroti bagaimana identitas individu atau kelompok ditempatkan dalam konteks politik tertentu, sementara *politics of identity* lebih fokus pada cara identitas diorganisir, diterapkan, dan dimanfaatkan sebagai alat politik. Kedua perspektif memberikan wawasan yang kaya dan kompleks mengenai peran identitas dalam konteks politik

Politik identitas menetapkan garis yang tegas dalam menentukan siapa yang diterima dan siapa yang ditolak. Karena batasan-batasan ini dianggap tidak dapat

diubah, status sebagai anggota atau non-anggota terlihat memiliki sifat permanen. Sama-sama, baik Agnes Heller maupun Donald L. Morowitz menyoroti tema yang serupa, mengartikan politik identitas sebagai politik perbedaan. Konsep ini juga membentuk hasil dari Simposium Asosiasi Politik Internasional yang diadakan di Wina pada tahun 1994. Salah satu kesan yang muncul dari pertemuan tersebut adalah pembentukan fondasi-fondasi praktik politik identitas.

Politik identitas, menurut Chandakirana (1989), sering kali dieksploitasi oleh para pemimpin sebagai alat politik. Mereka menggunakan istilah "kami" untuk mengidentifikasi "orang asli" yang menginginkan kekuasaan, dan "mereka" untuk mengidentifikasi "orang pendatang" yang diharapkan melepaskan kekuasaan. Dengan kata lain, Politik identitas sering disalahgunakan sebagai alat untuk memanipulasi dan menggalang dukungan politik demi kepentingan ekonomi dan politik.

Bagi Kemala, politik identitas menjelma menjadi alat praktis di tangan elit politik dan penguasa. Ia mengamati bagaimana identitas dimanipulasi untuk meraup dukungan demi kepentingan ekonomi dan politik. Politik identitas, bagaikan pisau bermata dua, dapat menggalang kekuatan, namun juga menjerumuskan ke jurang perpecahan. Heller, di sisi lain, menyelami akar filosofis politik identitas. Ia menelusuri bagaimana konstruksi identitas kelompok melahirkan klaim-klaim atas hak dan kekuasaan. Heller kritis terhadap potensi politik identitas untuk memicu konflik dan diskriminasi. Morowitz membawa pisau analisis tajam, membedah strategi politik identitas yang digunakan oleh aktor politik. Ia melihat bagaimana identitas dipolitisasi untuk membangun basis

dukungan dan meminggirkan kelompok lain. Morowitz menekankan bahaya politik identitas dalam mengikis kohesi sosial dan demokrasi.

Perbedaan sudut pandang Kemala, Heller, dan Morowitz membuka jalan bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang politik identitas. Ketiganya mengingatkan kita bahwa politik identitas bukan monolit, melainkan fenomena kompleks dengan konsekuensi multidimensi.

Pemahaman tentang implikasi politik identitas membuka ruang untuk refleksi dan dialog yang konstruktif. Dengan memahami akar pergerakan ini, kita dapat merumuskan strategi untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan menghargai keragaman budaya. Selain kecenderungan yang telah disebutkan sebelumnya, Klaus Von Beyme (dalam Ubai Abdillah, 2002) mengidentifikasi tiga karakteristik utama politik identitas:

1. **Membangun Narasi Baru:** Gerakan politik identitas pada dasarnya menolak narasi lama dan membangun narasi baru yang sesuai dengan identitas mereka. Narasi ini sering kali berfokus pada faktor-faktor biologis sebagai dasar perbedaan dan realitas kehidupan mereka.
2. **Sistem Apartheid Terbalik:** Politik identitas memiliki kecenderungan untuk membangun sistem apartheid terbalik. Hal ini berarti bahwa kelompok yang terpinggirkan berusaha untuk mendominasi kelompok lain dengan menggunakan identitas mereka sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan.
3. **Mobilisasi Politik:** Politik identitas memanfaatkan identitas kelompok untuk memobilisasi dukungan politik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye media, demonstrasi, dan bahkan kekerasan.

Salah satu kelemahan utama gerakan politik identitas adalah kecenderungannya untuk menciptakan teori kelompok yang spesifik dari ilmu. Hal ini dapat menyederhanakan pengalaman individu dan menghilangkan keragaman dalam suatu kelompok. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan mengakui keragaman dalam kelompok **dan** memahami bagaimana pengalaman individu dibentuk oleh faktor-faktor yang saling terkait, seperti ras, kelas, gender, dan orientasi seksual. Hal ini memungkinkan kita untuk mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dan adil untuk ketidakadilan sosial. Selain itu, fokus pada teori kelompok dapat menghilangkan fokus pada masalah struktural yang mendasari ketidakadilan. Sebagai contoh, gerakan politik identitas kulit hitam mungkin fokus pada pengalaman individu dengan rasisme, tetapi mereka mungkin tidak cukup fokus pada sistem rasisme yang ada di masyarakat yang menciptakan pengalaman tersebut.

Untuk melihat kecenderungan kuasa simbolisme politik identitas di Kota Ambon pada saat menjelang pilkada hingga pelaksanaan pilkada, penulis kemudian mencoba membangun simbolisme politik lokal yang kemudian membuat jaringan politik dalam pilkada sebagai embrio dalam memahami setiap lokalitas identitas lokal dengan ciri khas yang ‘memisahkan diri’ berdasarkan pengelompokan, baik dengan menggunakan pendekatan agama, etnis, kelompok paguyuban, NGO atau LSM plat merah, maupun jaringan kearifan lokal dengan memanfaatkan slogan-slogan bahasa, tradisi, serta simbol-simbol yang merupakan ciri khas dari kelompok identitas.

2.2.2. Politik Identitas dan Sentimen Etnisitas

Menurut Joseph Rothschild (2007), terdapat dua faktor utama yang mendorong kebangkitan sentimen etnis dalam politik identitas, yang dapat menyebabkan kelompok etnis yang tadinya ingin membentuk bangsa, kehilangan orientasi nasionalismenya:

1. Kompetisi yang Tidak Imbang:

- a. Persaingan di berbagai bidang: Kelompok etnis mungkin merasakan ketidakadilan dalam kompetisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dapat memicu kekuatan identitas etnis sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dirasakan.
- b. Marginalisasi dan diskriminasi: Jika kelompok etnis merasa terpinggirkan dan didiskriminasi, mereka mungkin beralih ke identitas etnis mereka untuk menyatukan diri dan memperjuangkan hak-hak mereka.

2. Mobilisasi oleh Aktor Politik:

- a. Manipulasi identitas: Aktor politik yang berkepentingan dapat memanfaatkan identitas etnis untuk memobilisasi dukungan dan memperoleh kekuasaan. Mereka mungkin menyebarkan ketakutan dan kebencian terhadap kelompok lain, atau menjanjikan keuntungan bagi kelompok etnis mereka sendiri.
- b. Kegagalan nasionalisme: Jika nasionalisme gagal menyatukan semua kelompok etnis dalam suatu negara, kelompok etnis mungkin beralih ke identitas etnis mereka sendiri untuk mencari rasa memiliki dan identitas.

Kedua faktor ini dapat saling memperkuat dan menciptakan lingkaran setan di mana sentimen etnis semakin kuat dan nasionalisme semakin lemah. Hal ini dapat

berakibat pada perpecahan nasional, konflik etnis, dan bahkan perang saudara (Rothschild, 2007).

Pandangan Joseph Rothschild, seperti yang diuraikan diatas, menggambarkan dua alasan utama terkait kebangkitan sentimen etnis dalam politik identitas dan bagaimana kelompok etnis dapat mengalami perubahan dalam orientasi nasionalismenya. Berikut adalah pemahaman lebih lanjut tentang dua alasan tersebut:

Pandangan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara identitas etnis, politik, dan dinamika sosial. Kondisi internal dan eksternal, termasuk faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial, dapat berkontribusi pada kekuatan atau kelemahan sentimen etnis dan orientasi nasionalisme suatu kelompok. Kebangkitan sentimen etnis dalam politik identitas adalah fenomena kompleks dengan konsekuensi yang serius bagi stabilitas dan perdamaian. Kerangka kerja Rothschild memberikan panduan yang berguna untuk memahami akar penyebab dan dampak dari fenomena ini. Penting untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong sentimen etnis, seperti kompetisi yang tidak seimbang dan mobilisasi politik yang manipulatif, untuk membangun masyarakat yang lebih damai dan inklusif.

Menguatnya sentimen etnis dalam masyarakat seringkali berakar dari ketidakadilan yang dihadapi oleh kelompok etnis tertentu di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ketidakadilan ini dapat berupa:. Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan hal tersebut.

Teori pertama, yang dikenal sebagai "modernisasi terencana", menjelaskan bahwa perubahan distribusi sumber daya, urbanisasi, dan industrialisasi di suatu negara memicu meningkatnya persaingan antar anggota masyarakat. Dalam

persaingan ini, kelompok yang memiliki modal, pendidikan, dan keahlian yang terbatas terancam tersingkir. Kelompok yang tersingkir ini kemudian merasa teralienasi dan tidak lagi merasa terwakili oleh sistem politik yang ada. Sebagai respons, mereka mencari identitas baru dengan merujuk pada simbol-simbol lain, terutama unsur-unsur etnis yang terdekat, akrab, dan mudah ditemukan.

Teori kedua, yaitu kolonisasi internal, menjelaskan bahwa ketidakadilan struktural mendorong kelompok yang terpinggirkan untuk melepaskan diri dari struktur negara yang ada. Hal ini dilandasi oleh perasaan inferioritas kelompok etnis yang memandang diri mereka sebagai korban penindasan dan eksploitasi oleh sistem pemerintahan atau kelompok etnis lain. *Teori ketiga* adalah deprivasi relatif yang dikembangkan oleh Robert Gurr (2005). Menurut pandangan ini, kesenjangan antara harapan dan kenyataan menyebabkan frustrasi dalam suatu kelompok etnis. Gurr menyatakan bahwa ketika harapan yang meningkat tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mencapainya, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini, jika dipolitisasi, dapat memicu gerakan sosial yang mengarah pada upaya disintegrasi. (Robert Gurr, 2005).

Tiga teori yang dipaparkan tentang menguatnya sentimen etnis, yaitu revised modernization, kolonisasi internal, dan relative deprivation, memberikan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi untuk memahami fenomena kompleks ini.

1. Revised Modernization:

- a) Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial dan ekonomi, seperti urbanisasi dan industrialisasi, dapat memicu kompetisi antar kelompok masyarakat.

- b) Kelompok yang kurang memiliki modal, pendidikan, dan keahlian dapat tertinggal dan merasa teralienasi dari sistem politik.
- c) Sebagai respons, kelompok ini mencari identitas baru dengan merujuk pada simbol-simbol etnis yang familiar dan mudah diakses.
- d) Sebagai kompensasi terhadap perasaan teralienasi, kelompok yang kalah dalam kompetisi dapat mencari identitas baru. Dalam konteks ini, identitas dengan unsur-unsur etnis, seperti simbol-simbol etnis, dapat menjadi cara untuk mendapatkan identitas yang baru dan membangun solidaritas di antara kelompok yang merasa tersingkir.

2. Internal Colonization Theory:

- a. Teori ini berfokus pada ketidakadilan struktural yang dialami oleh kelompok etnis tertentu.
- b. Kelompok yang merasa tertindas dan dieksploitasi oleh sistem pemerintahan atau kelompok etnis lain mungkin ingin melepaskan diri dari struktur tersebut.
- c. Keinginan ini didorong oleh rasa inferior dan frustrasi akibat ketidakadilan yang mereka alami.

3. Relative Deprivation Theory (Teori Deprivasi Relatif):

- a) Teori ini menekankan pada kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dialami oleh kelompok etnis.
- b) Ketika harapan tidak dibarengi dengan kemampuan untuk mencapainya, muncullah rasa frustrasi dan ketidakpuasan.
- c) Jika rasa frustrasi ini dipolitisasi, dapat memicu gerakan sosial yang mengarah pada upaya disintegrasi.

- d) Politikasi ketidakpuasan: ketidakpuasan ini dapat mengalami politisasi dan mengarah pada munculnya gerakan sosial yang bersifat disintegratif, yang berpotensi melibatkan identitas etnis sebagai salah satu komponennya.

2.3. Demokrasi Deliberasi

Demokrasi deliberasi pada awalnya terinspirasi oleh teori ketidakmungkinan dalam pilihan sosial. Para ahli teori demokrasi berpendapat bahwa bentuk demokrasi agregatif tidak dapat memberikan pembenaran demokratis atas keputusan kolektif yang diambil. Oleh karena itu, para penganut teori demokrasi mengalihkan perhatian mereka pada demokrasi deliberatif. Sebagai respons terhadap keterbatasan ini, para ahli teori demokrasi, termasuk Cohen (dikutip oleh (Hun Chung, 2020) mengajukan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya proses diskusi dan argumentasi yang rasional dan setara dalam mencapai keputusan kolektif yang sah. Cohen berpendapat bahwa keputusan demokratis yang sah adalah keputusan yang dapat menjadi objek kesepakatan yang bebas dan beralasan di antara para sederajat. Cohen (Hun Chung, 2020) menyatakan bahwa “hasil yang dihasilkan sah secara demokratis jika dapat menjadi objek kesepakatan yang bebas dan beralasan di antara para sederajat”. (Hun Chung, 2020) menawarkan teori formal tentang demokrasi deliberatif yang mencakup tiga bentuk diskusi:

1. Diskusi sempit: Diskusi yang tidak fokus dan tidak terstruktur yang menghasilkan hasil jangka panjang yang tidak dapat ditentukan.
2. Diskusi konstruktif: Diskusi yang terarah dan produktif yang dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas dan dapat diterima.

3. Debat: debat yang bersifat independen dan berujung pada posisi kompromi yang unik, terlepas dari status quo awalnya.

Dalam kerangka demokrasi deliberatif, diskusi dan argumentasi rasional dianggap sebagai inti dari proses pengambilan keputusan. Proses ini tidak hanya mengandalkan jumlah suara mayoritas, tetapi juga kualitas argumen yang diajukan oleh para peserta diskusi. Setiap individu dianggap sederajat dan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Melalui proses deliberasi ini, diharapkan muncul keputusan yang tidak hanya mencerminkan kehendak mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan pandangan minoritas, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih adil dan inklusif.

Cohen menekankan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dari proses deliberatif harus bebas dari tekanan eksternal dan didasarkan pada alasan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, kebebasan dan kesetaraan dalam diskusi menjadi kunci untuk mencapai legitimasi demokratis. Dengan cara ini, keputusan yang diambil tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi substantif karena didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini menawarkan solusi atas keterbatasan demokrasi agregatif dengan menekankan pentingnya proses deliberatif yang inklusif dan egaliter.

Dalam konteks kuasa simbolisme politik identitas, pendekatan yang diusulkan oleh (Nicole Curato, 2017) dapat memberikan wawasan yang berharga. Mereka berpendapat bahwa demokrasi deliberatif bukan hanya sekadar arena perdebatan teoritis, melainkan juga merupakan wilayah penelitian ilmu sosial empiris yang kaya. Pendekatan ini menggabungkan teori politik normatif dengan

penelitian empiris, menciptakan dialog yang produktif antara keduanya. Dalam hal ini, demokrasi deliberatif tidak hanya menjadi landasan teori, tetapi juga diterapkan dalam berbagai konteks nyata, menarik perhatian warga negara, aktivis, organisasi reformasi, dan pengambil keputusan di seluruh dunia.\

Penerapan praktis ide-ide deliberatif dalam konteks simbolisme politik identitas dapat membantu memitigasi konflik yang sering kali muncul dari perbedaan identitas. Misalnya, dalam situasi di mana simbol-simbol identitas digunakan untuk memobilisasi dukungan politik atau memperkuat aliansi, pendekatan deliberatif dapat mendorong diskusi yang lebih inklusif dan reflektif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses deliberatif, keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan keberagaman pandangan dan kepentingan dalam masyarakat, sehingga mengurangi potensi ketegangan dan memperkuat kohesi sosial.

Lebih lanjut, pengalaman praktis dari penerapan demokrasi deliberatif dalam konteks nyata dapat memberikan banyak pelajaran yang berharga untuk pengembangan teori dan ilmu sosial. Misalnya, studi kasus tentang bagaimana diskusi deliberatif berhasil atau gagal dalam mengatasi konflik identitas dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan proses deliberatif. Penelitian empiris ini, pada gilirannya, dapat memperkaya teori demokrasi deliberatif dengan memberikan data konkret dan contoh nyata tentang bagaimana proses ini bekerja dalam praktik. Dengan demikian, kombinasi antara teori dan praktik ini tidak hanya memperkuat pemahaman kita tentang demokrasi deliberatif, tetapi juga meningkatkan

kemampuan kita untuk menerapkannya secara efektif dalam berbagai konteks sosial dan politik.

(Nicole Curato, 2017) menyusun sejumlah tesis penting mengenai demokrasi deliberatif yang relevan dalam konteks kuasa simbolisme politik identitas. Berikut adalah penjelasan lanjutan tentang bagaimana setiap tesis tersebut berkaitan dengan simbolisme politik identitas dan bagaimana pendekatan demokrasi deliberatif dapat membantu mengatasi tantangan yang muncul dari dinamika identitas.

1. Demokrasi deliberasi adalah sebuah realita : Demokrasi deliberatif bukan hanya konsep teoritis, tetapi telah diterapkan dalam berbagai konteks nyata di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi di mana simbolisme politik identitas mempengaruhi dinamika sosial, demokrasi deliberatif dapat digunakan sebagai alat praktis untuk mengelola perbedaan dan mencapai keputusan yang lebih inklusif.
2. Demokrasi deliberatif merupakan esensi demokrasi. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks simbolisme identitas, esensi ini membantu memastikan bahwa semua kelompok identitas memiliki suara dalam proses deliberatif, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan keragaman masyarakat.
3. Deliberasi lebih dari sekedar diskusi. Deliberasi melibatkan proses argumentasi yang mendalam dan reflektif, tidak hanya pertukaran pendapat secara superfisial. Ini penting dalam konteks simbolisme politik identitas karena memungkinkan isu-isu identitas dibahas secara mendalam, mengurangi stereotip dan prasangka, serta membangun pemahaman yang lebih baik antara

kelompok yang berbeda.

4. Demokrasi deliberatif melibatkan banyak aspek komunikasi. Pendekatan ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, termasuk narasi, kesaksian, dan dialog. Dalam konteks simbolisme identitas, berbagai bentuk komunikasi ini dapat membantu mengungkapkan dan memahami pengalaman serta perspektif kelompok identitas yang berbeda, memperkaya proses deliberatif.
5. Deliberasi berlaku untuk semua. Demokrasi deliberatif bersifat inklusif dan universal, memastikan bahwa semua individu dan kelompok, terlepas dari identitas mereka, dapat berpartisipasi. Ini penting dalam konteks politik identitas, di mana inklusivitas membantu mengurangi marginalisasi dan memastikan bahwa semua suara didengar.
6. Demokrasi deliberatif memiliki pandangan yang berbeda tentang kekuasaan. Pendekatan ini melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang dapat dibagi dan didistribusikan melalui proses deliberatif. Dalam konteks simbolisme identitas, ini membantu mengurangi dominasi kelompok mayoritas dan memberikan kesempatan bagi kelompok minoritas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
7. Produk deliberasi bersifat plural bukan konsensus. Hasil dari proses deliberatif sering kali mencerminkan keragaman pandangan dan tidak selalu mencapai konsensus. Dalam konteks identitas, ini penting karena memungkinkan keputusan yang diambil mencerminkan kompleksitas dan keragaman masyarakat, bukan hanya pendapat mayoritas.
8. Partisipasi dan deliberasi berjalan beriringan. Partisipasi aktif adalah elemen kunci dalam demokrasi deliberatif. Dalam konteks simbolisme politik

identitas, partisipasi yang luas membantu memastikan bahwa proses deliberatif benar-benar inklusif dan representatif.

9. Transformasi yang disengaja membutuhkan waktu. Perubahan sosial dan politik melalui proses deliberatif tidak terjadi secara instan tetapi membutuhkan waktu. Dalam konteks identitas, ini berarti bahwa upaya untuk mengatasi konflik identitas dan membangun kohesi sosial memerlukan komitmen jangka panjang dan kesabaran.
10. Deliberasi menjadi solusi polarisasi kelompok. Proses deliberatif dapat membantu mengurangi polarisasi dengan mendorong dialog dan pemahaman antar kelompok. Dalam konteks simbolisme identitas, ini berarti bahwa deliberasi dapat menjadi alat untuk mengurangi ketegangan dan konflik antara kelompok yang berbeda.
11. Demokrasi deliberatif berlaku pada masyarakat yang sangat terpecah belah. Pendekatan ini relevan dalam konteks masyarakat yang sangat terpecah belah, di mana perbedaan identitas sering kali menjadi sumber konflik. Demokrasi deliberatif menawarkan cara untuk mengelola dan meredakan ketegangan melalui proses deliberatif yang inklusif dan rasional.
12. Penelitian deliberatif secara produktif menerapkan beragam metode. Penelitian dalam demokrasi deliberatif menggunakan berbagai metode, termasuk eksperimen, studi kasus, dan analisis kualitatif. Ini memungkinkan pendekatan yang komprehensif dalam mempelajari bagaimana simbolisme identitas mempengaruhi proses deliberatif dan bagaimana deliberasi dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang muncul dari dinamika identitas.

Dalam konteks kuasa simbolisme politik identitas, pendekatan demokrasi deliberatif juga perlu mempertimbangkan aspek komunikasi non-verbal sebagai bagian integral dari proses deliberatif. (Mendonça, 2022) menekankan bahwa demokrasi deliberatif tidak hanya terbatas pada komunikasi verbal tetapi juga melibatkan berbagai bentuk komunikasi non-verbal yang memainkan peran penting dalam mengekspresikan dan bertukar argumen.

Mendonca, Ercan, dan Asenbaum mengembangkan pendekatan multidimensi terhadap demokrasi deliberatif dengan menekankan pada dimensi visual, sonic, dan fisik komunikasi dalam musyawarah publik. Pendekatan ini relevan dalam konteks simbolisme politik identitas, di mana simbol-simbol visual dan ekspresi non-verbal sering kali menjadi alat penting dalam komunikasi politik dan mobilisasi identitas. Misalnya, bendera, pakaian adat, dan simbol agama dapat digunakan untuk menyampaikan pesan identitas yang kuat dan memobilisasi dukungan politik.

Pendekatan ini mengidentifikasi tiga cara utama di mana komunikasi non-verbal dapat berkontribusi pada musyawarah publik:

1. Sebagai bagian dari proses pemberian alasan: Komunikasi non-verbal, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan penggunaan simbol visual, dapat memperkuat argumen yang disampaikan secara verbal dan memberikan konteks tambahan yang membantu dalam proses deliberatif. Misalnya, penggunaan gambar atau video dalam presentasi dapat membuat argumen lebih meyakinkan dan mudah dipahami.
2. Memungkinkan dimasukkannya aktor-aktor yang terpinggirkan: Banyak kelompok yang terpinggirkan mungkin memiliki kesulitan dalam mengekspresikan pandangan mereka melalui komunikasi verbal

konvensional. Dengan mengakui dan mengintegrasikan komunikasi non-verbal, demokrasi deliberatif dapat menjadi lebih inklusif dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari aktor-aktor yang biasanya tidak terlibat dalam debat publik. Misalnya, seni dan pertunjukan budaya dapat menjadi media bagi kelompok minoritas untuk menyuarakan aspirasi mereka.

3. Mendorong refleksi dan cara berpikir baru: Komunikasi non-verbal dapat mendorong refleksi mendalam dan membuka cara berpikir baru tentang kontroversi publik yang ada. Dengan melibatkan elemen visual dan fisik, peserta dalam proses deliberatif dapat didorong untuk melihat isu-isu dari perspektif yang berbeda, yang pada gilirannya dapat mengarah pada solusi yang lebih inovatif dan inklusif. Misalnya, pameran seni atau instalasi interaktif yang menggambarkan isu-isu sosial dapat memicu diskusi yang lebih reflektif dan mendalam.

Dengan mengadopsi pendekatan multidimensi ini, demokrasi deliberatif dapat lebih efektif dalam mengelola simbolisme politik identitas. Komunikasi non-verbal memungkinkan ekspresi identitas yang lebih kaya dan kompleks, yang dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan membangun empati di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Selain itu, dengan memberikan ruang bagi berbagai bentuk komunikasi, demokrasi deliberatif dapat memastikan bahwa suara-suara dari semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sering kali terpinggirkan, dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan mengintegrasikan komunikasi non-verbal ke dalam proses deliberatif, demokrasi deliberatif dapat menjadi alat yang lebih kuat dalam menangani tantangan yang muncul dari simbolisme politik identitas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan inklusivitas dan representativitas, tetapi juga memperkaya proses deliberatif dengan perspektif yang lebih beragam dan reflektif, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks kuasa simbolisme politik identitas, pendekatan demokrasi deliberatif yang diajukan oleh (Pernaa, 2017) menyoroti pentingnya konsep ruang publik (*public sphere*) yang diusung oleh Jürgen Habermas. Habermas mengemukakan bahwa ruang publik adalah arena di mana warga negara dapat berkumpul untuk berdiskusi secara rasional dan kritis tentang masalah-masalah publik. Fishkin, dalam (Pernaa, 2017) menambahkan bahwa ruang publik ini bukan hanya sekedar tempat untuk perbincangan biasa, tetapi merupakan forum untuk diskusi publik yang serius dan beralasan.

Ruang publik, menurut Fishkin, adalah tempat di mana diskusi publik yang mendalam dan beralasan berlangsung. Ini adalah arena di mana warga negara dapat bertukar ide, argumen, dan perspektif dengan tujuan mencapai pemahaman bersama dan keputusan kolektif yang lebih baik. Dalam konteks simbolisme politik identitas, ruang publik ini menjadi krusial karena menyediakan platform bagi berbagai kelompok identitas untuk mengekspresikan pandangan mereka, mengartikulasikan kepentingan mereka, dan berpartisipasi dalam proses deliberatif.

Signifikansi ruang publik dalam konteks identitas menurut penjelasan Fishkin, dalam (Pernaa, 2017) adalah :

1. Platform untuk ekspresi identitas: Ruang publik memungkinkan kelompok-kelompok dengan identitas yang beragam untuk mengekspresikan simbol-simbol identitas mereka secara bebas. Ini termasuk penggunaan bahasa, simbol budaya, ritual, dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya yang mencerminkan identitas kelompok tersebut. Dengan adanya ruang publik yang inklusif, semua kelompok identitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengartikulasikan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam diskusi publik.
2. Mengatasi marginalisasi: Dalam banyak masyarakat, kelompok-kelompok identitas tertentu sering kali terpinggirkan dan suaranya tidak didengar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengembangkan ruang publik yang inklusif, demokrasi deliberatif dapat membantu mengatasi marginalisasi ini. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan dapat menggunakan ruang publik untuk menyuarakan aspirasi mereka, menyampaikan keluhan, dan berkontribusi dalam proses deliberatif.
3. Fasilitasi diskusi yang konstruktif: Ruang publik yang berfungsi dengan baik dapat memfasilitasi diskusi yang konstruktif antara kelompok-kelompok dengan identitas yang berbeda. Ini dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka, membangun pemahaman yang lebih baik, dan menciptakan dasar untuk solusi yang lebih inklusif dan adil. Diskusi yang terjadi dalam ruang publik juga dapat mendorong refleksi kritis dan membuka cara berpikir baru tentang isu-isu identitas yang kompleks.

Dalam pendekatan demokrasi deliberatif, ruang publik memainkan peran sentral sebagai arena di mana deliberasi terjadi. Diskusi yang berlangsung dalam

ruang publik tidak hanya mencakup pertukaran pendapat, tetapi juga proses pemberian alasan yang rasional dan kritis. Ini sesuai dengan pandangan Habermas bahwa deliberasi harus melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam diskusi yang beralasan dan bebas dari dominasi.

Dengan mengintegrasikan konsep ruang publik ke dalam demokrasi deliberatif, simbolisme politik identitas dapat dikelola secara lebih efektif. Ruang publik menyediakan platform di mana simbol-simbol identitas dapat diperdebatkan secara terbuka dan kritis, sehingga membantu membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang peran identitas dalam politik. Selain itu, ruang publik yang inklusif dapat membantu mengurangi ketegangan antara kelompok-kelompok identitas dengan mendorong dialog yang konstruktif dan reflektif.

Pendekatan demokrasi deliberatif yang menggabungkan konsep ruang publik Habermasian, seperti yang dijelaskan oleh (Pernaa, 2017) menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan mengelola kuasa simbolisme politik identitas. Dengan menyediakan arena untuk diskusi publik yang mendalam dan beralasan, ruang publik dapat membantu menciptakan proses deliberatif yang lebih inklusif, representatif, dan adil. Ini tidak hanya memperkaya demokrasi dengan perspektif yang lebih beragam tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menangani kompleksitas identitas dalam politik.

Realita yang ada demokrasi deliberasi ada yang berkualitas dan ada yang tidak. Fishkin dalam (Pernaa, 2017) menyebutkan ada 5 (lima) kondisi untuk melihat kualitas demokrasi deliberasi, yakni:

- a. Informasi: menekankan informasi yang benar dan relevan yang diberikan kepada peserta sebagai hal yang penting untuk menilai alternatif.

- b. Keseimbangan substantif: menyoroti evaluasi pertimbangan sebagai dasar deliberasi; manfaat atau beban suatu kebijakan, kausalitas suatu kebijakan dan evaluatifnya nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan.
- c. Keberagaman: menghubungkan keberagaman musyawarah dan demografi, menghormati heterogenitas penduduk dan oleh karena itu, posisi utama dalam representasi publik oleh peserta diskusi.
- d. Kehati-hatian: menampilkan warga negara sebagai posisi dengan preferensi yang tulus atas dasar argumen, bebas dari tekanan pemilu.
- e. Pertimbangan yang sama: menjelaskan evaluasi argumen berdasarkan isinya, bukan berdasarkan status sosial atau prestise peserta yang membuat argumen.

Dalam konteks kuasa simbolisme politik identitas, pendekatan yang dikemukakan oleh (Alfirdaus, 2016) mengenai demokrasi deliberatif sebagai demokrasi dari bawah atau "democracy from below" memberikan perspektif yang sangat relevan. Demokrasi dari bawah adalah demokrasi yang diprakarsai oleh, di, dan untuk masyarakat, didukung oleh praktik budaya sehari-hari mereka, dan dorongan ditentukan oleh konteks politik mereka sendiri. Terminologi ini dapat disamakan dengan akar rumput demokrasi, demokrasi informal, atau demokrasi sehari-hari, dan merupakan kebalikan dari demokrasi formalistis.

Demokrasi dari bawah dan simbolisme politik identitas menurut (Alfirdaus, 2016) :

Inisiatif dari masyarakat: Demokrasi dari bawah menekankan pentingnya inisiatif yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Dalam konteks simbolisme politik identitas, ini berarti bahwa upaya untuk mengelola dan memanfaatkan simbol-

simbolisme identitas harus berasal dari kebutuhan dan aspirasi komunitas. Misalnya, simbol-simbol budaya dan identitas lokal dapat digunakan untuk memperkuat kohesi sosial dan solidaritas komunitas.

1. Budaya sehari-hari sebagai basis demokrasi: Praktik budaya sehari-hari memainkan peran penting dalam demokrasi dari bawah. Dalam konteks ini, simbolisme politik identitas tidak hanya digunakan dalam arena politik formal tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa, ritual, dan tradisi lokal dapat memperkuat identitas komunitas dan menjadi dasar bagi partisipasi politik yang lebih inklusif dan representatif.
2. Konteks politik lokal: Demokrasi dari bawah berakar pada konteks politik lokal, yang memungkinkan pendekatan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal simbolisme politik identitas, ini berarti bahwa strategi dan kebijakan yang diadopsi harus mempertimbangkan dinamika dan realitas lokal. Misalnya, dalam konteks daerah dengan keragaman etnis yang tinggi, simbol-simbol identitas dapat digunakan untuk mempromosikan inklusivitas dan menghormati perbedaan.

Demokrasi formalistis sering kali bersifat top-down, di mana keputusan dan kebijakan ditentukan oleh elit politik tanpa banyak partisipasi dari masyarakat. Ini kontras dengan demokrasi dari bawah, di mana masyarakat memiliki kontrol lebih besar atas proses politik dan pengambilan keputusan. Dalam konteks simbolisme politik identitas, demokrasi formalistis mungkin gagal menangkap kompleksitas dan keanekaragaman identitas, sementara demokrasi dari bawah memberikan ruang bagi ekspresi dan partisipasi identitas yang lebih autentik dan relevan.

Dengan mengadopsi pendekatan demokrasi dari bawah, simbolisme politik identitas dapat digunakan secara lebih efektif untuk memperkuat partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat. Berikut adalah beberapa implikasi penting:

1. **Pemberdayaan komunitas:** Demokrasi dari bawah memberdayakan komunitas untuk mengambil peran aktif dalam proses politik, menggunakan simbol-simbol identitas mereka untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini dapat meningkatkan keterlibatan politik dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan.
2. **Inklusivitas dan representasi:** Pendekatan ini memastikan bahwa semua kelompok identitas memiliki suara dalam proses deliberatif, mengurangi marginalisasi dan meningkatkan representasi. Simbolisme identitas yang digunakan dalam konteks lokal dapat mencerminkan keanekaragaman masyarakat dan memperkuat rasa inklusivitas.
3. **Responsivitas terhadap kebutuhan lokal:** Dengan berfokus pada konteks politik lokal, demokrasi dari bawah memungkinkan kebijakan dan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat. Simbol-simbol identitas dapat digunakan untuk menciptakan solusi yang relevan dan efektif dalam mengatasi masalah lokal.

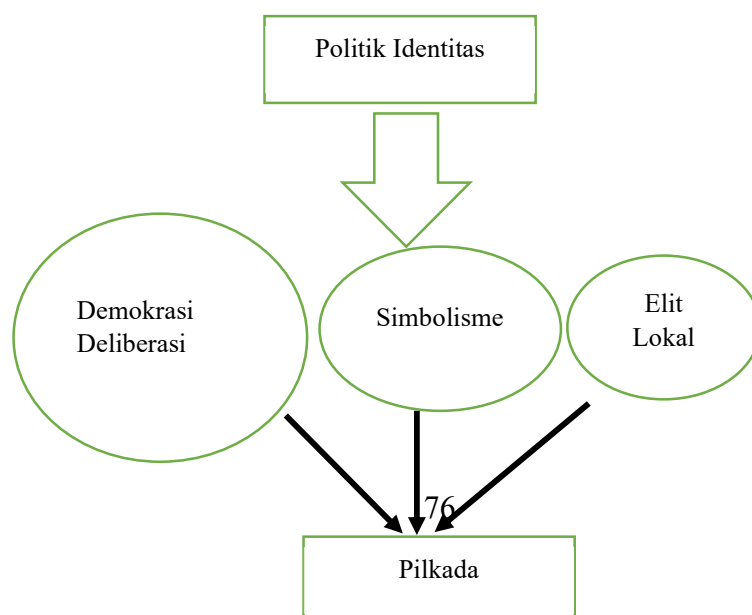
Pendekatan demokrasi deliberatif yang dikombinasikan dengan konsep demokrasi dari bawah, seperti yang dijelaskan oleh (Alfirdaus, 2016) menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan mengelola kuasa simbolisme politik identitas. Dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan menggunakan simbol-simbol identitas mereka secara efektif, demokrasi dari bawah dapat menciptakan proses deliberatif yang lebih inklusif,

representatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Ini tidak hanya memperkaya demokrasi dengan perspektif yang lebih beragam tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menangani kompleksitas identitas dalam politik. (Alfirdaus, 2016)

Definisi demokrasi dari bawah sebagai pemberdayaan diri dengan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama, dan dalam proses pemerintahan untuk memperluas cakupan demokrasi. Proses pemerintahan dalam konteks ini adalah baik dalam lingkup lingkungan internal masyarakat, lingkungan desa, sebagai representasi terkecilnya dan negara pada umumnya. Lingkungan internal masyarakat dapat mengacu pada konteks lingkungan yang bersifat keseharian. Sedangkan lingkungan negara lebih ditampilkan secara formal. Dengan adanya pemahaman seperti ini, maka demokrasi dari bawah tidak membatasi pemahamannya mengenai tata kelola hanya pada ruang lingkup lembaga-lembaga formal, namun yang lebih penting lagi adalah pada ranah informal (Alfirdaus, 2016)

2.2. Kerangka Pemikiran

Bagan 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan peneliti, 2023

2.4. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Ada 7 (tujuh) konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; (1) Simbolisme Kuasa Orang Kuat Lokal (2). Simbolisme kuasa bos Partai, (3) simbolisme politik dinasti/kekerabatan, Simbolisme tradisional lokal (Raja, Kepala Soa, Kepala Saniri, Kewang), (4) Simbolisme identitas Agama, (5) Simbolisme kuasa Ideologi Partai, (6) Simbolisme etnis (Organisasi Paguyuban), (7) simbolisme Identitas Geopolitik. Secara khusus 7 konsep kekuasaan tersebut dioperasionalkan dalam bentuk tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Operasionalisasi Konsep Penelitian

Kuasa Simbolisme Politik Identitas	Operasionalisasi Konsep Kuasa Simbolisme Politik Identitas
Simbolisme kuasa Orang Kuat Lokal (OKL)	1. Bagaimana pengaruh OKL sebelum, dan setelah pemilihan walikota Ambon 2. Bagaimana peran, Intervensi, manipulasi serta penekanan yang dilakukan oleh OKL terhadap pemilih 3. Bagaimana ancaman dari OKL sebelum dan menjelang pemilihan walikota 4. OKL yang mana yang melakukan kolaborasi dengan penguasa

Kuasa Simbolisme Politik Identitas	Operasionalisasi Konsep Kuasa Simbolisme Politik Identitas
	5. Apakah OKL menerima bantuan berupa pos dan juga tempat berkumpulnya para OKL
Simbolisme kuasa orang kuat Partai	1. Bagaimana ketua-ketua partai memiliki pengaruh terhadap pemilih yang berasal dari 2 komunitas besar 2. Bagaimana bos partai memiliki pengaruh yang kuat dalam menyerap aspirasi masyarakat 3. Memiliki jaringan kuat hingga ke pemerintah pusat 4. Memiliki kedekatan dengan para petinggi partai lainya
Simbol politik Dinasti/Kekerabatan, Simbol tradisional lokal (Raja, Kepala Soa, Kepala Saniri, Kewang,)	1. Apakah politik dinasti memiliki pengaruh yang kuat misalnya pengaruh ambones sebagai calon kuat dalam pilwalkot 2. Bagaimana simbolime tradisional lokal misalnya para kepala kewang, saniri, soa memiliki pengaruh positif pada masing-masing wilayah/desa untuk mempengaruhi pemilih
Simbolisme identitas Agama	1. Apakah simbol agama masih relevan dalam setiap pemilihan walikota 2. Simbol agama sebagai basis kekuatan dua komunitas terbesar di Kota Ambon 3. Bagaimana peran tokoh agama dalam menyikapi dan memanfaatkan jaringan pemilih melalui mimbar agama yang menyerukan agar memilih calon tertentu
Simbolisme kuasa Ideologi Partai	1. Bagaimana memilah kelompok masyarakat berdasarkan ideologi partai 2. Kelompok ideologi partai cenderung merepresentasikan kelompok tertentu berdasarkan ideologi partai 3. Ideologi partai adalah cermin pengelompokan masyarakat pemilih berdasarkan penganut partai yang secara tradisional sangat loyal dengan partai tertentu
Simbolisme etnis (Organisasi Paguyuban),	1. Etnisitas adalah bagian terbesar dalam panggung politik lokal 2. Bagaimana panggung etnisitas sebagai politik identitas selalu menjadi bagian kekuatan terbesar dalam pemilihan walikota

Kuasa Simbolisme Politik Identitas	Operasionalisasi Konsep Kuasa Simbolisme Politik Identitas
	3. Organisasi paguyuban selalu mendeklarasikan diri untuk mendukung calon tertentu setelah ada konsesus yang dibangun secara politik 4. Etnisitas melalui organisasi paguyuban yang memiliki massa yang besar cenderung menjadi primadona bagi setiap calon tertentu pada saat sebelum pilkada dan menjelang pilkada
Simbol Identitas Geopolitik	1. Bagaimana memetakan pemilih berdasarkan wilayah 2. Tempat tinggal menunjukan preferensi politik bagi pemilih 3. Bagaimana wilayah-wilayah yang merupakan basis massa dari kelompok tertentu berdasarkan tempat tinggal calon 4. Bagaimana melakukan politisasi wilayah sebagai basis sosial dan politik pada masing-masing calon walikota

Sumber: Data olahan, (2022)